

KOMUNIKASI PEMERINTAH DESA DALAM PROGRAM STUNTING DI DESA TIKUPON KECAMATAN BUALEMO

Ismawati Doembana¹, Muh.Syahbudin², Suanti Tunggal³

Universitas Muhammadiyah Luwuk

Email: ismadoembana84@gmail.com

ABSTRAK

Adapun tujuan pada penelitian ini yakni untuk mengetahui Komunikasi Pemerintah Desa dalam program stunting di Desa Tikupon Kecamatan Bualemo, dengan metode pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, kuesioner, dan dokumentasi, yang mana sumber data yang digunakan berupa data Primer dan data Sekunder. Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa yang berjumlah 512 jiwa. Sehingga menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah 41 orang yang akan diteliti. Metode analisis yang digunakan berdasarkan statistik deskriptif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dalam bentuk Tabulasi. Sedangkan data kualitatif akan dijelaskan berdasarkan asumsi logika dan asumsi teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah desa dalam program stunting di Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai dengan hasil prenatal 78,11% dengan kategori baik.

Kata Kunci: Komunikasi, Pemerintah, Program, Stunting

PENDAHULUAN

Perkembangan di era globalisasi saat ini, meskipun upaya perubahan paradigma ke arah mengurangi peran pemerintah dan bahkan dengan tegas David Boaz (1997) seperti dikutip Rian Nugraha D. (2006) mengatakan bahwa *"The best government is the least government"*, namun esensi fungsi pemerintah yakni semangat memimpin, mengayomi, mendukung kepentingan publik tetap tidak boleh berkurang¹.

Pembangunan pada dasarnya tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur tetapi pembangunan berbicara tentang bagaimana membangun manusia atau pembangunan manusia. Pertumbuhan pribadi sama pentingnya dengan kemajuan fisik. Pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan landasan budaya dan intelektualitas bangsa. Menurut Pancasila dan Undang-

¹ Husein Najib Muh, Halika Herman La ode. *"Komunikasi Pemerintah dalam kajian teoriti"*, Cv Azka Pustaka. 2023. Pasaman Barat Sumatera Barat.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan nasional diselenggarakan dalam rangka membangun manusia dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual.

Komunikasi pemerintahan desa berfokus pada pembangunan komunikasi yang efektif dan transparan antara pemerintah desa dan masyarakatnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program desa, memperkuat akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, membangun desa yang sejahtera, adil dan berkelanjutan. Pemerintah juga melatih aparatnya untuk menjadi komunikator yang efektif. Aparat desa harus mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Konsep komunikasi pemerintahan desa tikupon masih dalam tahap pengembangan. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dengan masyarakatnya².

Stunting merupakan salah satu permasalahan gizi yang terjadi di Indonesia (Kemenkes, 2017). Masalah kesehatan masyarakat dianggap berat bila jumlah *stunting* sebesar 30–39% dan serius bila jumlah *stunting* $\geq 40\%$ (WHO, 2013). *Stunting* menggambarkan status kurang gizi pada masyarakat yang bersifat kronik di masa pertumbuhan dan perkembangan sejak awal kehidupan. UNICEF pada tahun 2013 mencatat ada sekitar 1 dari 4 balita di dunia mengalami *stunting* (Unicef, 2013).

Masalah *stunting* pada balita dapat menghambat perkembangan anak serta dampak negatif lainnya seperti penurunan intelektual, rentan terhadap penyakit tidak menular, penurunan produktifitas hingga menyebabkankemiskinan dan risiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah (Unicef, 2013). Penelitian menunjukkan bahwa anak yang mengalami *stunting* pada masa balita akan beresiko tinggi memiliki tingkat kognitif yang rendah, prestasi belajar dan psikososial buruk (Diaz GM, Alandia-Román CC, TonaniR, Contente MMMG, Vicente SA de F, 2015). Dampak dari *stunting* dapat berlangsung seumur hidup serta dapat mempengaruhi ke generasi berikutnya (Unicef, WHO, 2020). Dampak jangka pendek *stunting* berakibat pada gangguan pertumbuhan anak, kurangnya kecerdasan serta gangguan metabolisme tubuh. Selain dampak jangka pendek *stunting* juga dapat menyebabkan dampak jangka panjang seperti menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar serta menurunnya sistem kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit (Demsa Simbolon, 2019).

Stunting pada balita dapat disebabkan karena kurangnya nutrisi selama kehamilan. Status gizi pada ibu hamil sangat mempengaruhi keadaan kesehatan dan perkembangan janin. Faktor lain yang berhubungan dengan *stunting* adalah asupan ASI eksklusif pada balita. Balita yang tidak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan berisiko tinggi mengalami *stunting* (Fikadu, Assegid and Dube, 2014).³

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan angka *stunting* di Indonesia. Dalam rangka mencapai target tersebut, Pemerintah telah meluncurkan berbagai program intervensi,

² <https://rotendaokab.go.id/wp-content/uploads/2023/12/BUKU-STATISTIK-SEKTORAL-KABUPATEN-ROTE-NDAO-TAHUN-2023.pdf>

³ WHO (2013) *Childhood stunting: Context, causes and consequences*. Genewa.

termasuk program stunting ditingkat desa, untuk itu dibutuhkan komunikasi pemerintah desa dengan masyarakat dalam pelaksanaan program stunting sangatlah penting. Komunikasi yang efektif dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang stunting, mendorong partisipasi masyarakat dan memastikan keberhasilan program stunting.

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat membantu dalam upaya pencegahan stunting pertumbuhan desa. Salah satu implikasi UU Desa adalah sejak tahun 2015 telah disalurkan dana desa sebagai sumber pendapatan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019. Penetapan prioritas penggunaan dana desa ini bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan, acuan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa dan acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa. Salah satu prioritas penggunaan dana desa di bidang kesehatan adalah perbaikan gizi untuk mencegah stunting. Peran pemerintah desa sangat penting dalam menurunkan angka stunting (KemKumHAM, 2014).

Desa Tikupon, seperti banyak desa di Indonesia, menghadapi masalah stunting. Stunting adalah kondisi terhambatnya pertumbuhan fisik dan perkembangan otak pada anak balita yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan jangka panjang, seperti keterlambatan mental, keterlambatan pertumbuhan fisik, dan penurunan kemampuan belajar. Dimana, cakupan balita stunting Kabupaten Banggai khususnya di desa Tikupon sebanyak 20 % (data Dinas Kesehatan Kabupaten banggai 2023). Stunting dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan pihak terkait, termasuk kader posyandu, bidan desa, dan tokoh masyarakat.

Desa Tikupon, sebagai salah satu desa yang ada di Kecamatan Bualemo, tidak terlepas dari permasalahan stunting pada balita. Dari hasil observasi dan wawancara awal menunjukkan permasalahan tentang stunting dipengaruhi oleh kemampuan bayi untuk makan, jenis dan variasi makan, faktor genetik orang tua dan pemberian susu formula. Ketepapan informasi terkait dengan sanitasi, air, edukasi, bimbingan pra nikah, keluarga berencana masih belum memahami dengan baik. untuk itu diharapkan partisipasi pemerintah dalam membentuk kader posyandu desa sehingga kegiatan posyandu dapat mensosialisasikan melalui literasi kepada masyarakat dan program gizi melalui makan tambah, pemberian vitamin dan lain-lain yang berkaitan dengan program stunting.

Dalam hal ini fokus permasalahannya yakni masyarakat Desa Tikupon belum memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang masalah yang dihadapi dalam penanganan stunting. Untuk itu dibutuhkan peran pemerintah melalui posyandu desa yang telah terbentuk untuk saling berkoordinasi dengan pihak terkait antara kader posyandu, penyuluh kesehatan, penyuluh keluarga berencana pada kegiatan edukasi dan sosialisasi di masyarakat Desa Tikupon sebagai kegiatan lintas sektor yang dilakukan secara kondisional, berkesinambungan dengan cara menampilkan leaflet atau poster sebagai media penyampaian informasi.

Kondisi ini menjadi tugas yang tidak ringan bagi pemerintahan desa untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kejadian stunting terkait erat dengan status gizi dan kesejahteraan

masyarakat. Untuk itu dibutuhkan peran pemerintah desa untuk menurunkan angka kejadian stunting pada balita melalui penyuluhan yang relevan dengan kondisi masyarakat. Selama ini pemerintah Desa Tikupon telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk mencegah dan menangani stunting di wilayahnya. Besarnya anggaran pemerintah Desa

Salah satu penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tikupon yang mendesak adalah penurunan angka stunting pada balita yang masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Banyaknya kasus stunting pada balita di Desa Tikupon tidak terlepas dari rendahnya pemenuhan kebutuhan gizi balita. Rendahnya status gizi masyarakat desa Tikupon dipengaruhi oleh keterbatasan perekonomian masyarakat yang termasuk dalam kategori menengah ke bawah.

Komunikasi pemerintah desa dalam program stunting merupakan upaya yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mengubah perilaku, dan pada akhirnya menurunkan angka stunting. Dengan komunikasi pemerintah yang tepat dan melibatkan seluruh stakeholder, diharapkan upaya pencegahan stunting dapat berhasil. Melalui Anggaran APBDes Desa Tikupon terutama ditujukan untuk kegiatan yang mendukung program penurunan kejadian stunting pada balita seperti perbaikan gizi bagi ibu hamil, menyusui dan balita melalui posyandu atau puskesmas. Semakin besar anggaran APBDes, idealnya kejadian stunting pada balita semakin menurun. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji adanya peran pemerintah di dalam komunikasi melalui program untuk menurunkan atau menekan tingkat kenaikan stunting maka judul penelitian ini yakni tentang komunikasi pemerintah dalam program stunting di Desa Tikupon Kecamatan Bualemo

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai. Waktu penelitian yang dibutuhkan sejak pelaksanaan observasi, pengajuan judul sampai proses kegiatan penyelesaian penelitian dengan membutuhkan waktu kurang lebih 6 (Bulan) bulan yaitu bulan April sampai September 2024.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Observasi (*observation*) yaitu melakukan pengumpulan data melalui pengamatan langsung pada objek penelitian dalam aktivitas keseharian, lingkungan dan sasaran kerja yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Angket (kuesioner), yaitu pengumpulan data melalui daftar pernyataan yang disajikan masing-masing responden.
3. Telaah dokumen, yaitu pengumpulan data-data melalui buku-buku, laporan, jurnal atau tulisan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti.
4. Dokumentasi, yaitu Teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui pengumpulan bukti terkait dengan keterangan, seperti halnya kutipan, gambar, sobekan koran, dan bahan referensi lainnya.

Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini untuk dianalisis yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang bersumber dari hasil kuesioner dengan informasi kunci serta hasil kuesioner dengan informasi kunci serta hasil pengamatan langsung di lokasi penelitian.
2. Data Sekunder, adalah data pendukung bagi data primer yang diperoleh dari bahan-bahan literature seperti dokumen-dokumen serta laporan-laporan dan kepustakaan lainnya yang dipandang relevan dengan penelitian ini.

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, umumnya berupa obyek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu di mana peneliti mempelajari atau menjadikan obyek penelitian dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai dengan jumlah 512 jiwa.

2. Sampel

Sampel adalah suatu himpunan atau bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dengan melihat jumlah populasi penelitian yang cukup banyak maka untuk menentukan jumlah populasi dan besarnya sampel digunakan rumus Slovin dalam Umar (2000 : 78)⁴ sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n= Ukuran Sampel

N= Ukuran Populasi

e= Persen kelonggaran ketidaktelitian pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir

Presentase ketidaktelitian menurut Suharsimi Arikunto (2010 : 120)⁵ “bahwa jika jumlah subyeknya dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih”. Dalam hal ini penulis mengambil ketidaktelitian 15%. (e = 15% = 0,15) dengan jumlah populasi 512 orang (N = 512), jadi jumlah sampel dapat ditentukan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{512}{1 + 512(0,15)^2} \\ &= \frac{512}{1 + 512(0,0225)} \\ &= \frac{512}{1 + 11,52} \\ &= \frac{512}{12,52} = 40,89 \end{aligned}$$

⁴ Umar. 2010. *Metodologi Penelitian*. hal.78. Jakarta : Rineka Cipta.

⁵ Ibid hal.120.

n = 40,89 n= 41

Selanjutnya Cochran menyatakan bahwa teori penampilan sampel didasarkan pada asumsi bahwa setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai bagian dari sampel. Hal ini berarti bahwa sampel yang diambil secara acak harus mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan.

Maka penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu memilih masyarakat atau responden yang memahami masalah yang akan diteliti, yang berjumlah 41 orang

PEMBAHASAN

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk menganalisis tentang Komunikasi Pemerintah Desa dalam program stunting di Desa Tikupon Kecamatan Bualemo, yang mana telah dikemukakan melalui tabel-tabel tersebut di atas. Adapun variabel pada penelitian ini bersifat tunggal untuk itu, di dalam pembahasan ini, peneliti dapat mendeskripsikan berdasarkan indikator pada variabel tersebut sebagaimana uraian di bawah ini:

Komunikasi adalah suatu proses untuk menyampaikan sebuah persepsi di antara dua pihak yang mengadakan interaksi. Terdapat ada beberapa Unsur-unsur komunikasi, menurut Cangara dalam Manap Solihat, dkk yang berjudul *Interpersonal Skill* yaitu:

1. Sumber

Dalam komunikasi selalu melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim pesan/informasi. Berdasarkan hasil penelitian mengkaji tentang komunikasi pemerintah dalam program stunting di Desa Tikupon Kecamatan Bualemo yang dapat dideskripsikan bahwa komunikasi pemerintahan menunjukkan dalam proses pengiriman dan penerimaan pesan (*messages*) dari satu pihak kepada pihak lain melalui cara-cara dan saluran-saluran tertentu dengan harapan terjadi perubahan perilaku sesuai dengan pesan yang diterima. Jadi tiap komunikasi pemerintahan adalah hasil dari kognisi (*thinking*) dan perilaku (*doing*). Dalam pemahaman tentang elemen-elemen dalam proses komunikasi adalah satu tahap pertama dalam pengembangan pengetahuan tentang komunikasi pemerintahan atau komunikasi di sektor publik. dimana proses komunikasi pemerintahan diawali oleh pengirim (administrator atau manajer pemerintah), dalam komunikasi selalu melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim pesan/informasi yang berusaha berkomunikasi dengan aparatur birokrasi, masyarakat dan organisasi lain.

2. Pesan

Pesan dalam komunikasi mempunyai peran penting dalam penyampaian kepada penerima pesan. Untuk itu dipilih seperangkat informasi sebagai pesan yang ingin dikirimkan (*ideation*). Pesan dalam komunikasi mempunyai peran penting dalam penyampaian kepada penerima pesan. Ketika hendak mengirim informasi, pengirim menterjemahkan informasi tersebut dalam bentuk kata-kata, tanda-tanda, atau lambang-lambang yang tepat yang diharapkan dapat dengan mudah dipahami oleh penerima dan diharapkan memiliki efek terhadap orang lain. Ekspresi gagasan atau

ide dalam bentuk verbal (lisan dan tulisan), atau nonverbal (bahasa isyarat, ekspresi wajah, gerakan, atau gambar), disebut pesan (*message*).

Pesan yang disampaikan dapat berupa kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, peraturan-peraturan, keputusan-keputusan. Pesan yang sudah disandi (*encode*) kemudian disampaikan dengan cara verbal (berbicara untuk menyampaikan pesan lisan, menulis untuk menyampaikan pesan tulisan); atau cara nonverbal (menggambar untuk menyampaikan pesan dalam bentuk gambar, atau melalui tindakan untuk menyampaikan pesan bahasa isyarat).

3. Media

Media yang di gunakan dalam memindahkan pesan dari sumber kepada penerima informasi. Pesan disampaikan melalui saluran (*channel*) yang dianggap lebih efektif sebagai media yang di gunakan dalam memindahkan pesan dari sumber kepada penerima informasi. Saluran atau alat melalui mana pesan disampaikan dapat berupa surat, memo, laporan, telegram, faksimili, surat kabar, majalah, buku manual, buletin, poster untuk bentuk tulisan; telepon, interkom, TV, konferensi dan pertemuan, pembicaraan untuk komunikasi oral.

4. Penerima

Penerima dalam hal ini sebagai pihak yang menjadi sasara pesan yang di kirimkan oleh sumber informasi. Setelah pesan dikirimkan, maka perhatian dalam proses komunikasi diarahkan ke penerima pesan (*receiver*), sebagai penerima dalam hal ini sebagai pihak yang menjadi sasara pesan yang di kirimkan oleh sumber informasi. Satu respon khusus diharapkan oleh pengirim dari setiap pesan yang disampaiakannya. Dalam kontek ini, pertama-tama penerima melakukan pemaknaan atau interpretasi (*decoding*) atas pesan yang diterima, dan baru kemudian ia memberi respons terhadap pesan.

5. Pengaruh

Pengaruh dalam hal ini adalah perbedaan dalam atau apa yang di lakukan penerima pada saat sesudah dan sebelum menerima sebuah pesan. Bagaimana penerima memberi respon terhadap pesan ditentukan oleh pemahaman penerima atas pesan yang diterimanya. Pengaruh dalam hal ini adalah perbedaan dalam atau apa yang di lakukan penerima pada saat sesudah dan sebelum menerima sebuah pesan ketika satu pesan mempunyai efek yang dikehendaki, bukan suatu persoalan apakah informasi yang disampaikan tersebut merupakan tindak berbagai informasi atau tidak.

6. Tanggapan Balik

Hasil dari yang di sampaikan atau umpan balik adalah salah satu bentuk dari pengaruh yang berasal dari penerima. Respon apa yang diberikan oleh penerima menjadi umpan balik, atau balikan (*feedback*) bagi pengirim pesan. Hasil dari yang di sampaikan atau umpan balik adalah salah satu bentuk dari pengaruh yang berasal dari penerima. Atas dasar balikan tersebut, maka pengirim pesan mungkin mempertimbangkan kembali pesan yang telah disampaiakannya kepada penerima, mungkin mempertimbangkan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Umpan balik inilah yang dapat dijadikan landasan untuk mengevaluasi derajat

efektivitas komunikasi. Umpan balik dari penerima pesan terhadap pesan yang diterimanya dapat disampaikan dalam bentuk verbal atau nonverbal.

7. Lingkungan

Pengaruh dalam hal ini lingkungan merupakan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi jalannya sebuah komunikasi. Dalam konteks umpan balik, maka penerima berposisi menjadi pengirim, dan pengirim berposisi menjadi penerima. Sehingga memberikan pengaruh dalam hal ini lingkungan merupakan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi jalannya sebuah komunikasi.

Jadi komunikasi pemerintahan pada hakikatnya merupakan proses penyebaran dan pertukaran informasi di dalam dan dengan luar organisasi. Melalui komunikasi pemerintahan, maka eksekutif pemerintahan bertukar dan membagi informasi dengan yang lain, yaitu dengan legislatif, dengan staf, dengan pelaku bisnis, dan dengan masyarakat. Melalui komunikasi, eksekutif pemerintah atau administrator atau manajer pemerintah bermaksud untuk mempengaruhi sikap (*attitude*), pemahaman (*understanding*), dan perilaku (*behavior*) birokrasi dan masyarakat. Dengan demikian, tiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis merupakan bagian dari proses komunikasi pemerintahan, baik sebagai sender di satu waktu, dan di waktu lain ia menjadi *receiver*.

Bahkan, komunikasi pemerintahan tidak saja sebagai sarana atau alat bagi pemerintah untuk menyampaikan dan atau menerima informasi tentang suatu kebijakan publik, misalnya, tetapi juga sebagai sarana memadukan kegiatan-kegiatan secara terorganisasi dalam mewujudkan kerjasama. Juga merupakan sarana penyaluran masukan sosial ke dalam sistem sosial, dan sarana memodifikasi perilaku, mempengaruhi perubahan, memproduksi informasi, sarana untuk mencapai tujuan serta membantu pelaksanaan dan memadukan fungsi-fungsi manajemen.

KESIMPULAN

Berdasarkan Analisis dari hasil penelitian ini dapat dideskripsikan melalui kesimpulannya bahwa Komunikasi Pemerintah Desa dalam program stunting di Desa Tikupon Kecamatan Bualemo dapat interpretasi baik dengan presentase capaian sebesar 78,11%.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, Adapun maka peneliti dapat mengemukakan saran dari hasil penelitian adalah:

1. Perlu adanya peningkatan komunikasi pemerintah kepada masyarakat di Desa Tikupon Kecamatan agar program stunting dapat terlaksana dengan maksimal.
2. Dibutuhkan suatu kesadaran masyarakat dalam meningkatkan partisipasinya dalam melaksanakan program stunting agar apa yang diharapkan bersama dapat tercapai dengan menurunnya angka stunting yang ada di Desa Tikupon Kecamatan Bualemo.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2020) *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Asrori (2014) ‘Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kudus’, *Jurnal Bina Praja*, 6(2), pp. 101 – 116.
- Demsa Simbolon, B.B. (2019) *Pencegahan Stunting Periode 1000 Hari Pertama Kehidupan Melalui Intervensi Gizi Spesifik pada Ibu Hamil Kurang Energi Kronis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Diaz GM, Alandia-Román CC, Tonani R, Contente MMMG, Vicente SA de F, P.-S.F. de C. (2015) ‘Effect of Polishing and Brushing on Removal of Cigarette Smoke Stains from Artificial Teeth’, *Int J Odontostomatol*, 9(5), pp. 405–412.
- Fikadu, T., Assegid, S. and Dube, L. (2014) ‘Factors associated with stunting among children of age 24 to 59 months in Meskan district, Gurage Zone, South Ethiopia: A case-control study’, *BMC Public Health*, 14(1), pp. 1–7. Available at: <https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-800>.
- Hasan, E. (2014) *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ipan, Purnamasari H, P.E. (2021) ‘Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting’, *Kinerja*, 18(3), pp. 383–391.
- Kemenkes (2017) *Data Pusat Informasi Profil Kesehatan Indonesia*. Jakarta:Kemenkes RI.
- Kem Kum HAM (2014) *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Kriyanto, R. (2016) *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Kusuma, N.S. dan A. (2015) *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo.
- Lantikawati, R.P. (2018) *Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Tata Kelola Masalah Persampahan Di Kota Tasikmalaya*. Universitas Siliwangi.
- Lestari, P. et al. (2022) ‘Peranan Pemerintah Desa dalam Pencegahan Stunting Di Desa Kencana Kecamatan Balai Jaya Tahun 2022’, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), pp. 2227–2230. Available at: <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2789>.
- Miles, M.B. and A.M.H. (2005) *Qualitative Data Analysis. (terjemahan)*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. (2014) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, T. (2015) *Kybernologi Sebuah Metamorphosis*. Tangerang: Sirou Crednetia Center.
- Ngongano, Y. (2016) *Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan (Studi kasus di Desa Laba Besar, Kecamatan Loloda Selatan)*. Universitas Halmahera Tobelo.
- Rasyid, R. (2017) *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ririn dkk (2018) ‘Peran Posyandu untuk Menangani Stunting di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus’, *Journal Of Public Policy And Management Review*, 10(3), pp. 1–10.
- Riskesdas (2018) *Laporan Riset Kesehatan Dasar 2017*. Jakarta.

- Sadu, W. (2015) *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokus Media.
- Saputri, R.A. (2019) 'Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Stunting Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung', *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 2(2), pp. 152–168. Available at: <https://doi.org/10.36341/jdp.v2i2.947>.
- Suhartono, S. *et al.* (2020) 'Implementation of Law Number 6 of 2014 Concerning Village for Budgeting Plan in Sidoarjo Regency', 121(6), pp. 204–209. Available at: <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.042>.